

**GOTONG ROYONG SEBAGAI PRAKTIK ADMINISTRASI PUBLIK
PARTISIPATIF: STUDI KASUS PARTISIPASI MASYARAKAT DI RT
002/RW 001, LINGKUNGAN 1, BANDAR JAYA BARAT, TERBANGGI
BESAR, LAMPUNG TENGAH**

UTS Mata Kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik

Oleh

ANNISA SHOFA AZKIA

NPM 2416041076



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Teori Administrasi Publik (<i>Good Governance</i>).....	14
2.2.2 Teori Partisipasi Masyarakat	16
2.2.3 Teori Gotong Royong	18
2.2.4 Gotong Royong sebagai Praktik Administrasi Publik Partisipatif	20
2.3 Kerangka Berpikir	23
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28

3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Teknik Keabsahan Data	32
DAFTAR PUSTAKA	34

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gotong royong merupakan nilai budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi simbol solidaritas sosial. Menurut Koentjaraningrat (dalam Subiyakto et al., 2017), gotong royong merupakan sistem nilai inti masyarakat Indonesia yang menekankan kerja sama dan kebersamaan. Dalam konteks modern, gotong royong tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga dapat dipahami sebagai praktik administrasi publik partisipatif di tingkat lokal, di mana masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan urusan publik melalui prinsip kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Menurut Rohmah et al. (2025), administrasi publik tidak hanya mencakup kegiatan pemerintahan formal, tetapi juga peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kepentingan bersama. Oleh karena itu, praktik gotong royong dapat dipandang sebagai bagian dari implementasi nilai administrasi publik partisipatif di tingkat lokal.

Partisipasi masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bailah (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sedangkan Arnstein (dalam Lauria & Slotterback, 2020) mengklasifikasikan tingkat partisipasi mulai dari manipulasi hingga kendali penuh oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia juga menegaskan pentingnya partisipasi publik melalui kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendorong pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Program seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) menjadi bukti konkret penerapan nilai partisipatif tersebut. Menurut Widayati (2020), kegiatan gotong royong bukan hanya aktivitas

sosial, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat yang memperkuat kohesi sosial dan mempererat hubungan antara warga dan pemerintah.

Namun, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Modernisasi, urbanisasi, dan gaya hidup individualistik telah menggerus semangat kebersamaan di sebagian masyarakat. Gotong royong yang dulu menjadi rutinitas sosial kini mulai jarang dilakukan karena kesibukan kerja, perbedaan status sosial, serta menurunnya rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Fenomena ini terlihat di berbagai daerah, termasuk di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah. Berdasarkan data BPS (2024), mayoritas penduduk berada pada usia produktif, namun partisipasi sosial dalam kegiatan gotong royong cenderung menurun. Sebagian warga tetap aktif berkontribusi, sementara yang lain bersikap pasif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai budaya yang dijunjung tinggi dengan realitas sosial di lapangan. Padahal, dalam perspektif administrasi publik, gotong royong tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme partisipatif yang mendukung tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana praktik gotong royong dapat menjadi wujud konkret dari administrasi publik partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra pemerintah. Melalui kegiatan gotong royong, masyarakat sebenarnya berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan sosial di tingkat lokal, meskipun dalam bentuk sederhana. Aktivitas ini memperkuat fungsi sosial administrasi publik, di mana nilai-nilai seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas tercermin dalam tindakan kolektif warga. Dengan memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana nilai-nilai gotong royong dapat dihidupkan kembali sebagai praktik administrasi publik yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di era modern.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di tingkat lokal?
3. Bagaimana kegiatan gotong royong mencerminkan nilai-nilai administrasi publik partisipatif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di tingkat lokal.
3. Menganalisis kegiatan gotong royong sebagai praktik administrasi publik partisipatif yang mencerminkan kolaborasi antara warga dan pemerintahan lokal dalam mewujudkan tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai penerapan prinsip *administrasi publik partisipatif* di tingkat masyarakat. Penelitian ini juga memberikan

kontribusi pada pengembangan teori partisipasi warga dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis komunitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan aparatur lingkungan dalam merancang kebijakan atau program yang mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi masyarakat untuk memperkuat nilai gotong royong sebagai bagian dari praktik pemerintahan partisipatif di tingkat lokal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berperan penting dalam memberikan landasan konseptual dan empiris bagi penelitian ini. Melalui tinjauan terhadap beberapa studi sebelumnya, peneliti dapat memahami bagaimana partisipasi masyarakat diimplementasikan dalam konteks sosial dan pemerintahan. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan tradisional seperti gotong royong maupun dalam bentuk inovasi digital partisipatif, memiliki peran besar dalam mewujudkan *good governance*. Dengan demikian, kajian ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan riset dan memperkuat posisi penelitian terkait praktik administrasi publik partisipatif di tingkat lokal, khususnya di RT 002/RW 001, Bandar Jaya Barat, Terbanggi Besar, Lampung Tengah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama/Penulis	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan	Relevansi
Bella Carolina BR Pandiangan (2024), Penerapan Gotong Royong dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Afdeling II (Studi	Penelitian di Afdeling II Kebun Sei Meranti menunjukkan bahwa penerapan kegiatan gotong royong berhasil dilakukan melalui mekanisme sosialisasi langsung kepada masyarakat serta	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Perbedaan: Penelitian Bella	Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam gotong royong tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tradisi, tetapi juga oleh faktor kepemimpinan, kesibukan warga,

Kasus: Kebun Sei Meranti Kecamatan Began Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau).	melalui program khusus berupa penanaman Proyek Gizi. Upaya ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gotong royong, meskipun terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran bermusyawarah, kesibukan masyarakat dalam pekerjaan sehari-hari, serta keterbatasan waktu untuk berkumpul. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun nilai gotong royong masih diakui, faktor internal dan eksternal memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.	dilakukan di lingkungan perkebunan (Riau) dengan fokus pada strategi pemimpin setempat dalam meningkatkan partisipasi, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di tingkat RT semi-perkotaan (Bandar Jaya Barat) yang lebih menekankan dinamika sosial, peran kepemimpinan RT, serta faktor kesibukan dan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan.	dan pola komunikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sekarang yang juga menyoroti dinamika sosial serta tantangan partisipasi di lingkungan semi-perkotaan.
--	---	---	---

I Wayan Agus Setiawan (2017), Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Bali dalam Kegiatan Gotong Royong (Studi Kasus Sakti Buana Seputih Banyak Lampung Tengah).	Hasil penelitian di Kampung Sakti Buana menunjukkan partisipasi masyarakat etnis Bali tergolong tinggi pada semua tahap pembangunan: tahap perencanaan (80% hadir dan aktif memberi ide pembangunan), tahap pelaksanaan (80% ikut gotong royong dengan sumbangan tenaga, uang, atau material), tahap evaluasi (67% terlibat menilai hasil pembangunan), dan tahap pemanfaatan hasil pembangunan (80% melakukan pemeliharaan). Temuan ini menegaskan	Persamaan: Penelitian ini sama-sama mengkaji bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan menekankan pentingnya kontribusi warga secara aktif. Perbedaan: Penelitian ini menyoroti etnis Bali di pedesaan dengan fokus pada partisipasi dalam pembangunan fisik yang terstruktur, sedangkan penelitian sekarang lebih menekankan pada gotong royong rutin di tingkat RT perkotaan yang terkait kebersihan lingkungan, perbaikan fasilitas, serta dinamika sosial sehari-hari.	Penelitian ini relevan karena menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat di berbagai tahap pembangunan. Meskipun konteksnya etnis Bali di pedesaan, prinsip keaktifan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan sangat sesuai untuk dibandingkan dengan kondisi partisipasi masyarakat di tingkat RT semi-perkotaan dalam penelitian sekarang.
---	---	---	---

	bahwa masyarakat Bali masih menjaga tradisi gotong royong sebagai wujud solidaritas, meskipun juga terdapat tantangan berupa keterbatasan dalam kesesuaian antara rencana dan realisasi pembangunan.		
Ririn Hidayati dan I Made Suwanda (2022), Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Media Center Surabay sebagai Wujud Good Governance.	Penelitian ini membahas bagaimana Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan <i>Media Center</i> sebagai sarana komunikasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan pengawasan	Persamaan: Penelitian ini dan penelitian sekarang sama-sama menyoroti partisipasi masyarakat sebagai bentuk implementasi nilai <i>good governance</i> dan kolaborasi antara warga dan pemerintah. Perbedaan: Penelitian Hidayati dan Suwanda berfokus pada	Penelitian ini relevan karena menunjukkan bagaimana prinsip administrasi publik partisipatif dapat diwujudkan baik melalui teknologi maupun kegiatan sosial tradisional seperti gotong royong. Temuan Hidayati dan Suwanda memperkuat argumen bahwa

	kebijakan. Media Center berfungsi sebagai kanal partisipatif yang memungkinkan warga berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui informasi digital, pelaporan layanan, dan penyebaran informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis teknologi dapat memperkuat nilai-nilai <i>good governance</i>, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.	partisipasi digital melalui <i>Media Center</i> di lingkungan perkotaan besar, sedangkan penelitian ini menelaah partisipasi masyarakat secara langsung (tatap muka) dalam kegiatan gotong royong di tingkat komunitas lokal (RT 002/RW 001, Bandar Jaya Barat).	keterlibatan masyarakat dalam tata kelola publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan berkelanjutan, baik di ranah digital maupun komunitas lokal.
--	---	---	--

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam pembangunan sosial dan pemerintahan yang partisipatif. Baik dalam konteks tradisional seperti gotong royong maupun dalam

praktik modern yang memanfaatkan teknologi informasi, keterlibatan warga berperan penting dalam menciptakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi yang aktif tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kepemimpinan lokal. Nilai-nilai sosial seperti solidaritas dan kebersamaan terbukti menjadi kekuatan utama dalam menjaga semangat gotong royong di berbagai wilayah, sementara lemahnya kepemimpinan atau menurunnya kesadaran warga sering kali menjadi penghambat partisipasi. Selain itu, dukungan kelembagaan dan inovasi kebijakan publik juga memainkan peran penting dalam memperluas ruang partisipasi warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Sumarto (2025), keberhasilan *good governance* tidak hanya bergantung pada birokrasi yang efisien, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah mampu melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, hasil-hasil penelitian terdahulu menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk menelaah bagaimana gotong royong dapat dipahami sebagai praktik administrasi publik partisipatif di tingkat lokal. Dalam konteks RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah, kegiatan gotong royong mencerminkan penerapan nyata nilai-nilai *good governance* melalui kolaborasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan bersama. Melalui partisipasi sukarela, rasa tanggung jawab sosial, serta kepemimpinan komunitas yang kuat, praktik gotong royong di wilayah ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana administrasi publik partisipatif dapat terbentuk secara alami di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap tata kelola publik yang lebih transparan, akuntabel, serta berkelanjutan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Administrasi Publik (*Good Governance*)

Administrasi publik merupakan proses kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam pandangan modern, administrasi publik tidak lagi dipahami sebatas aktivitas birokrasi pemerintah, melainkan sebagai hubungan yang kolaboratif dan partisipatif antara aparatur publik dan warga negara. Menurut Rodiyah et al. (2021), administrasi publik mencakup keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan publik yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Administrasi publik juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur, mengelola, dan melayani kepentingan masyarakat secara adil dan efektif. Menurut Musri & Mulia (2022), administrasi publik mencakup dimensi etika, nilai, dan tanggung jawab sosial yang menuntut aparatur publik untuk bekerja secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Etika administrasi publik berperan penting dalam membentuk kepercayaan publik, sebab melalui integritas dan tanggung jawab aparatur, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya diukur dari efektivitas struktur dan prosedur, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai moral dan partisipatif diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan administrasi publik secara teoritis telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Pada awalnya, paradigma *Old Public Administration* (OPA) menekankan efisiensi dan hierarki dalam birokrasi, sedangkan paradigma *New Public Management* membawa prinsip efisiensi dan orientasi hasil layaknya sektor swasta. Namun, dalam dua dekade terakhir, muncul paradigma *New Public Service* (NPS) yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar sebagai pelanggan. Paradigma ini menekankan nilai-nilai partisipasi, demokrasi, dan kolaborasi sebagai dasar bagi praktik pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Paradigma ini selaras dengan prinsip *good governance*, yang menempatkan partisipasi

masyarakat sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Melalui keterlibatan publik, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Menurut Rohmah et al. (2025), administrasi publik masa kini menuntut adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif. Sementara itu, Dwiyanto (2021) menegaskan bahwa *good governance* hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara efektivitas birokrasi dan keterlibatan sosial warga negara. Oleh karena itu, paradigma administrasi publik modern mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat sebagai strategi utama dalam menciptakan tata kelola yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka nilai dan prinsip, administrasi publik menegaskan pentingnya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, efisiensi, serta kolaborasi. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi aparatur publik dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengelolaan urusan publik. Etika, sebagaimana dijelaskan oleh Musri & Mulia (2022), menjadi ruh utama yang mengarahkan penyelenggaraan administrasi publik agar tetap berpihak pada kepentingan umum dan menjunjung tinggi integritas. Nilai partisipasi juga menempati posisi sentral dalam administrasi publik, karena menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam proses pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, kegiatan seperti gotong royong mencerminkan implementasi nyata dari prinsip partisipatif dan kolaboratif yang menjadi inti dari paradigma administrasi publik modern.

Dengan demikian, teori administrasi publik memberikan dasar konseptual untuk memahami bahwa praktik pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh aparatur negara, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam pencapaian tujuan publik. Kolaborasi antara pemerintah dan warga, sebagaimana tercermin dalam kegiatan gotong royong, merupakan manifestasi nyata dari administrasi publik partisipatif di tingkat lokal. Nilai-nilai etika, partisipasi, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola publik yang berorientasi pada

kepentingan bersama sekaligus memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat. Lebih jauh, teori administrasi publik partisipatif memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *good governance*, karena keduanya menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.2 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam konteks sosial, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan bersama, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengambilan keputusan pembangunan. Bentuk partisipasi tersebut tidak hanya berupa tenaga, tetapi juga dapat meliputi pikiran, waktu, keahlian, maupun materi untuk mendukung tercapainya tujuan kolektif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menjelaskan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi menjadi bagian penting dari proses demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Keith Davis (dalam Zuraidah, 2020) mengemukakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok untuk menyumbangkan ide sekaligus bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan bersama. Sementara itu, Gaventa dan Valderma (dalam Yusuf, 2019) menekankan bahwa partisipasi masyarakat kini tidak hanya terbatas pada keterlibatan fisik, tetapi juga mencakup kepedulian dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan publik. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dipandang sebagai proses sosial yang menekankan pada kesadaran, tanggung jawab, dan kolaborasi antarwarga. Partisipasi bukan sekadar

tindakan teknis, tetapi bentuk kesadaran kolektif untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Partisipasi masyarakat juga memiliki keterkaitan dengan konsep modal sosial. Putnam (dalam Khairussalam et al. 2024) menjelaskan bahwa modal sosial terbentuk dari jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong masyarakat untuk bekerja sama secara efektif demi tercapainya tujuan bersama. Dengan kata lain, semakin kuat modal sosial dalam suatu kelompok, semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan sosial seperti gotong royong. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari keterlibatan langsung, tetapi juga dari bentuk dan tingkat kontribusi yang diberikan warga. Menurut Ulum & Dewi (2021), partisipasi masyarakat dapat berbentuk nyata maupun tidak nyata. Bentuk nyata misalnya berupa uang, harta benda, tenaga, atau keterampilan, sedangkan bentuk tidak nyata berupa ide, gagasan, keikutsertaan sosial, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Huraerah (dalam Bobsuni & Ma'ruf, 2021) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Partisipasi pikiran, yaitu sumbangan ide atau pendapat yang disampaikan dalam forum pertemuan, musyawarah, atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yaitu keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, pembangunan fasilitas umum, atau membantu sesama.
3. Partisipasi harta benda, yaitu dukungan dalam bentuk materi seperti uang, makanan, atau barang untuk mendukung kegiatan sosial.
4. Partisipasi keterampilan dan keahlian, yaitu kontribusi kemampuan khusus masyarakat untuk mendukung kegiatan produktif atau pelayanan sosial.
5. Partisipasi sosial, yaitu keikutsertaan masyarakat sebagai bentuk solidaritas, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap lingkungan.

Dalam perspektif kualitatif, partisipasi tidak dipahami sebagai sekumpulan indikator yang dapat diukur secara statistik, tetapi sebagai fenomena sosial yang memiliki makna dan nilai tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mendorong partisipasi tidak hanya bersifat material, melainkan juga moral

dan kultural. Rosyani et al. (2019) menyebutkan bahwa faktor pendapatan rumah tangga, aksesibilitas, pemanfaatan teknologi informasi, serta nilai-nilai sosial budaya menjadi penentu penting dalam partisipasi masyarakat. Sementara Rahman et al. (2021) menegaskan bahwa motivasi individu, peran pemimpin lokal, dukungan fasilitas, serta kondisi lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor tersebut dipahami bukan sebagai variabel, melainkan sebagai kondisi sosial yang membentuk makna partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan sosial yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, solidaritas, dan kesadaran bersama untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. Melalui partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkelanjutan.

2.2.3 Teori Gotong Royong

Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini tetap menjadi perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gotong royong diartikan sebagai kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pambudi (dalam Listyaningsih, 2024) menjelaskan bahwa gotong royong merupakan perekat antaranggota masyarakat di tengah perbedaan dan gempuran perubahan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Keberadaan perilaku gotong royong telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari identitas budaya yang perlu terus dilestarikan. Sementara itu, Kurnia et al. (2023) menegaskan bahwa gotong royong adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan aktivitas kolektif dengan tujuan bersama, di mana gotong berarti bekerja dan royong bermakna kebersamaan atau musyawarah. Dengan demikian, gotong royong tidak hanya dimaknai sebagai kerja bersama secara fisik, melainkan juga sebagai manifestasi dari kepedulian sosial dan semangat solidaritas yang mendalam. Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong memiliki peran penting dalam menjaga harmoni

sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain kebersamaan, solidaritas, keikhlasan, kepedulian, musyawarah, dan rasa kekeluargaan. Nilai kebersamaan tercermin dari semangat warga untuk menyatukan tenaga dan pikiran demi menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan secara individu. Solidaritas tampak dari sikap saling membantu, terutama ketika ada warga yang mengalami kesulitan. Keikhlasan terlihat dari kesediaan untuk berkontribusi tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan musyawarah menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bersama. Adapun rasa kekeluargaan memperkuat ikatan emosional antarwarga sehingga hubungan sosial semakin erat dan harmonis.

Selain bernilai budaya, gotong royong juga memiliki fungsi sosial yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Pertama, gotong royong berfungsi sebagai perekat sosial, yang memperkuat hubungan antarindividu dalam komunitas. Kedua, gotong royong berperan sebagai instrumen pembangunan sosial, di mana warga dapat secara kolektif membangun fasilitas umum, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan keamanan bersama. Ketiga, gotong royong menjadi media pendidikan sosial, karena melalui kegiatan ini masyarakat belajar nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama. Keempat, gotong royong berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas dan harmoni karena setiap individu merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam komunitasnya. Dalam praktiknya, gotong royong terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan fisik maupun sosial. Contoh konkret antara lain kerja bakti membersihkan lingkungan, pembangunan dan perawatan fasilitas umum, ronda malam untuk menjaga keamanan, serta kegiatan solidaritas ketika warga mengalami musibah atau menyelenggarakan acara sosial. Aktivitas ini menunjukkan bahwa gotong royong bukan hanya sarana untuk meringankan pekerjaan, tetapi juga wadah untuk memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan warga.

Dalam pendekatan kualitatif, gotong royong dipahami sebagai fenomena sosial yang mengandung nilai-nilai simbolik dan kultural. Ciri-ciri gotong royong

tercermin dari keikutsertaan warga secara sukarela, adanya kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta kesadaran kolektif untuk mencapai kepentingan bersama. Frekuensi kegiatan yang dilakukan secara rutin juga menggambarkan seberapa kuat nilai gotong royong masih hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, aspek-aspek tersebut tidak dilihat sebagai indikator kuantitatif, melainkan sebagai dimensi sosial yang menunjukkan tingkat partisipasi dan solidaritas warga. Secara keseluruhan, gotong royong dapat dipahami sebagai tradisi sosial yang memiliki makna budaya, fungsi praktis, dan nilai filosofis yang mendalam. Ia tidak hanya sekadar kegiatan bersama untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat solidaritas dan membangun rasa kebersamaan. Dalam konteks administrasi publik, gotong royong mencerminkan penerapan nilai-nilai partisipatif di tingkat lokal, di mana masyarakat secara sadar terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik berbasis komunitas. Dengan demikian, gotong royong tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga praktik nyata administrasi publik partisipatif yang menegaskan kolaborasi antara warga dan struktur pemerintahan lokal dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

2.2.4 Gotong Royong sebagai Praktik Administrasi Publik Partisipatif

Gotong royong merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial yang berakar kuat pada nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks administrasi publik, praktik gotong royong tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan sosial tradisional, tetapi juga sebagai bentuk penyelenggaraan urusan publik berbasis partisipasi warga. Melalui kegiatan ini, masyarakat secara mandiri mengorganisasi sumber daya, melakukan koordinasi, serta melaksanakan tindakan kolektif untuk kepentingan bersama tanpa bergantung sepenuhnya pada instruksi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa gotong royong sesungguhnya adalah praktik administrasi publik yang dijalankan oleh masyarakat sendiri melalui mekanisme kolaboratif dan kesadaran sosial. Nilai-nilai

kebersamaan dan musyawarah yang melekat di dalamnya menjadi pondasi utama bagi pembentukan tata kelola publik yang partisipatif dan berkeadilan.

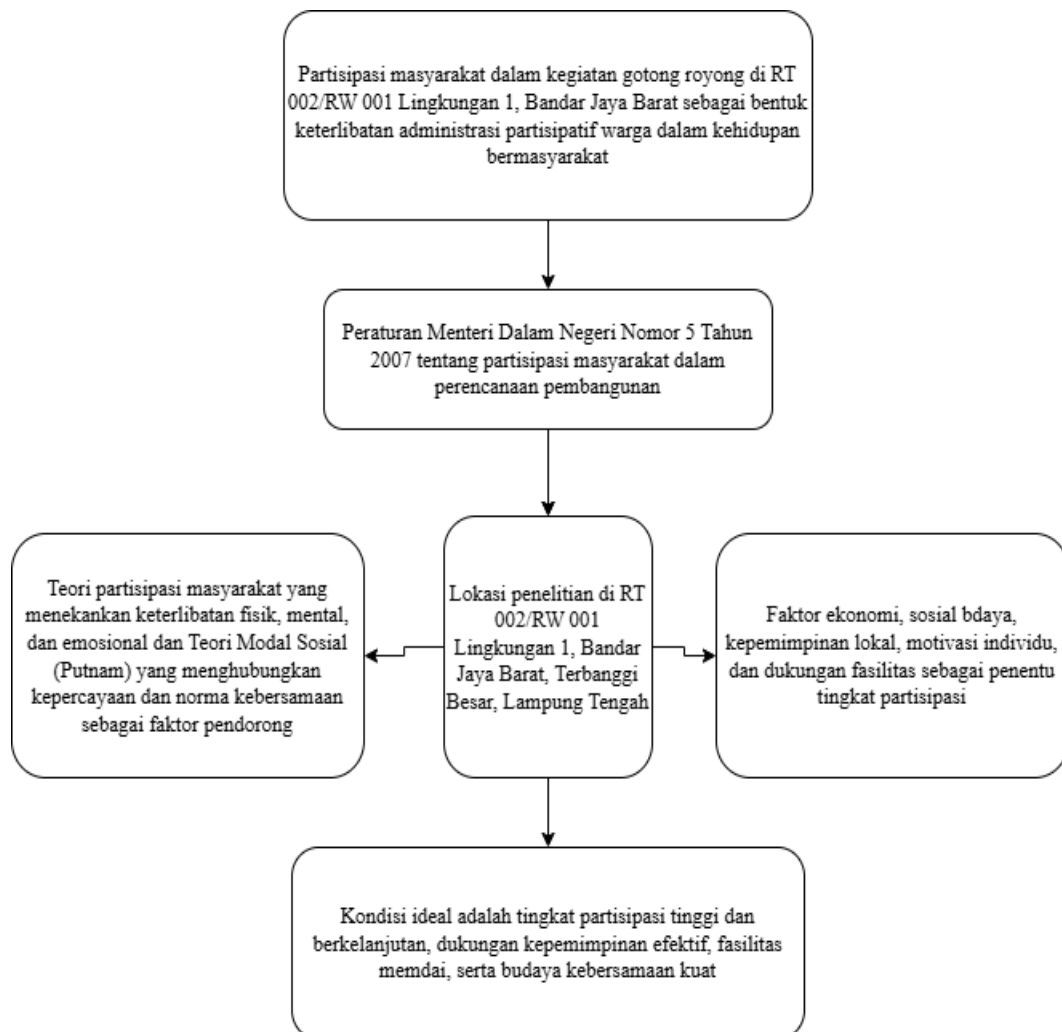
Administrasi publik partisipatif menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Dalam pandangan Nurjaman (2025), partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong merupakan bentuk penguatan administrasi di tingkat akar rumput, di mana warga berperan sebagai pelaku aktif yang mengelola kegiatan publik melalui prinsip tanggung jawab bersama, musyawarah, dan gotong royong. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat belajar untuk mengatur kepentingan bersama secara mandiri tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menjadi sarana pendidikan kewarganegaraan yang menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya peran warga dalam tata kelola lingkungan. Dengan demikian, gotong royong mencerminkan praktik administrasi publik partisipatif karena melibatkan proses manajerial, koordinatif, dan kolaboratif di antara anggota masyarakat secara sukarela dan egaliter.

Lebih jauh, Sumarto (2025) menjelaskan bahwa inovasi dan partisipasi merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan *good governance*. Dalam konteks lokal, kegiatan gotong royong dapat dianggap sebagai bentuk inovasi sosial yang memperkuat praktik pemerintahan partisipatif, karena menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas kepentingan publik. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong menjadi bukti bahwa nilai-nilai *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dapat tumbuh dari inisiatif warga tanpa harus menunggu kebijakan formal dari pemerintah. Melalui kegiatan ini, warga turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman dengan semangat kolektif yang kuat. Dengan kata lain, praktik gotong royong memperlihatkan bahwa tata kelola publik tidak hanya berlangsung di ruang birokrasi, tetapi juga di ruang sosial tempat masyarakat membangun solidaritas dan kepedulian bersama.

Dalam konteks penelitian ini, kegiatan gotong royong yang berlangsung di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat, merupakan contoh konkret penerapan nilai-nilai administrasi publik partisipatif di tingkat lokal. Warga berperan aktif dalam mengorganisasi kegiatan kebersihan, pembangunan fasilitas umum, serta berbagai bentuk kerja sama sosial yang dilakukan secara sukarela tanpa tekanan formal dari pemerintah. Aktivitas tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi administrasi publik berbasis komunitas, di mana masyarakat mampu mengelola urusan publiknya sendiri melalui prinsip musyawarah, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif. Secara konseptual, gotong royong dapat dipahami sebagai praktik administrasi publik partisipatif yang mencerminkan kolaborasi antara warga dan negara dalam skala mikro. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga penggerak utama dalam penyelenggaraan urusan publik yang berkelanjutan. Nilai-nilai keikhlasan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian kolektif yang melekat di dalamnya menjadi landasan penting bagi penguatan tata kelola publik yang etis, partisipatif, dan demokratis.

Lebih dari itu, praktik gotong royong memperlihatkan keterpaduan antara nilai budaya dan prinsip administrasi publik modern yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai inti dari *good governance*. Melalui partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial, terbentuk hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat yang saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan bersama. Gotong royong menjadi ruang belajar bagi masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai kepemimpinan kolektif, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga relevansi teoritis dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, gotong royong sebagai praktik sosial dan administrasi publik partisipatif dapat menjadi model kolaborasi yang efektif antara warga dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola publik yang berorientasi pada kebaikan bersama.

2.3 Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang berorientasi pada upaya untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui keterlibatan langsung antara peneliti dengan partisipan penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggali makna sosial di balik fenomena partisipasi masyarakat dalam gotong royong. Seperti dijelaskan oleh Kusumastuti & Khoiron (2019), metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Fokus penelitian ini tidak terletak pada pengumpulan data numerik atau statistik, melainkan pada proses interpretasi terhadap makna, nilai, serta bentuk keterlibatan warga dalam aktivitas sosial yang mencerminkan praktik administrasi publik partisipatif di tingkat komunitas. Menurut Safarudin et al. (2023), pendekatan kualitatif menitikberatkan pada proses pengamatan terhadap fenomena dan pencarian makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kualitas penelitian ini sangat bergantung pada ketepatan peneliti dalam menggunakan bahasa ilmiah untuk mendeskripsikan realitas sosial yang diamati. Melalui penerapan metodologi kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan deskripsi yang komprehensif, mendalam, dan reflektif mengenai bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong sebagai wujud partisipasi publik yang berakar pada nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.

Mengingat penelitian ini difokuskan pada satu lokasi spesifik, yaitu RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat, maka metode studi kasus deskriptif dipandang paling tepat untuk digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memberikan uraian yang kontekstual dan rinci mengenai faktor-faktor sosial serta perilaku masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Melalui metode ini, peneliti berupaya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor pendorong dan penghambatnya, serta

makna sosial yang terkandung di balik praktik gotong royong tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks administrasi publik partisipatif di tingkat lokal.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Partisipasi masyarakat dimaknai sebagai keterlibatan aktif warga dalam berbagai bentuk kegiatan sosial, baik melalui tenaga, pikiran, waktu, keahlian, maupun materi. Keterlibatan tersebut mencerminkan kepedulian sosial, tanggung jawab bersama, dan solidaritas antarwarga yang menjadi dasar penting dalam praktik administrasi publik partisipatif. Berdasarkan teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam, partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial, kepercayaan, serta norma kebersamaan yang terbentuk di lingkungan sosial. Sejalan dengan itu, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama sebagai berikut:

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat.

Aspek ini menguraikan bagaimana warga berkontribusi dalam kegiatan gotong royong, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi yang diamati meliputi tenaga (misalnya kegiatan kebersihan lingkungan dan kerja bakti), materi (seperti sumbangan uang, makanan, atau perlengkapan), pikiran dan ide (partisipasi dalam musyawarah dan pengambilan keputusan), serta partisipasi sosial (dalam menjaga keharmonisan antarwarga). Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan variasi bentuk keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di lingkungan penelitian.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi.

Aspek ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Faktor tersebut mencakup kondisi ekonomi yang menentukan kemampuan kontribusi warga, nilai-nilai sosial dan budaya seperti solidaritas dan tradisi kebersamaan, peran kepemimpinan lokal dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai penggerak, serta motivasi individu baik yang bersifat altruistik maupun pragmatis. Dukungan fasilitas dan kondisi sosial yang kondusif juga menjadi pertimbangan penting dalam analisis ini.

3. Makna Gotong Royong bagi Masyarakat.

Aspek ini menelaah nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung dalam kegiatan gotong royong. Aktivitas gotong royong tidak hanya dipahami sebagai kerja bersama secara fisik, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial yang menumbuhkan rasa kebersamaan, kepedulian, keikhlasan, serta tanggung jawab kolektif. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat memaknai nilai-nilai tersebut dan bagaimana makna tersebut berperan dalam menjaga keberlanjutan tradisi gotong royong di tengah dinamika modernisasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena dinilai representatif dalam menggambarkan karakter masyarakat semi-perkotaan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional, khususnya semangat gotong royong dalam kehidupan sosial. RT 002 memiliki sekitar 60 Kepala Keluarga (KK) dengan tingkat heterogenitas sosial yang cukup tinggi, baik dari segi pekerjaan, pendidikan, maupun usia. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal seperti perdagangan, buruh, dan jasa, sementara sebagian lainnya merupakan pegawai swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kondisi sosial yang beragam ini menjadikan wilayah tersebut menarik untuk dikaji dalam konteks partisipasi masyarakat. Selain itu, masyarakat RT 002 dikenal memiliki tingkat partisipasi sosial yang tinggi dan solidaritas

antarwarga yang kuat, terlihat dari rutinitas kerja bakti dan kegiatan sosial lainnya. Dukungan dari ketua RT dan tokoh masyarakat turut memudahkan proses penelitian, baik dalam tahap observasi maupun wawancara. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bentuk partisipasi, faktor pendorong dan penghambat, serta makna sosial yang terkandung dalam kegiatan gotong royong di wilayah tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang berfungsi saling melengkapi dalam menggambarkan fenomena sosial terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan warga yang terlibat dalam kegiatan gotong royong. Informan penelitian terdiri dari ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Data primer digunakan untuk menggali secara mendalam bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, serta pandangan mereka terhadap makna gotong royong.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber pendukung seperti arsip kegiatan RT, catatan administrasi, literatur akademik (artikel, jurnal, dan buku), serta dokumen resmi dari pemerintah daerah yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil analisis dan memperkaya konteks penelitian dengan landasan teoritis dan empiris yang memadai.

Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan valid terhadap fenomena partisipasi masyarakat dalam konteks administrasi publik partisipatif.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi satu sama lain agar data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan dan kedalaman yang tinggi dalam menggambarkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat.

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami pola perilaku warga, bentuk kerja sama, tingkat keterlibatan masyarakat, serta dinamika sosial yang terbentuk selama kegiatan berlangsung. Pengamatan dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti turut hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap interaksi sosial yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada sejumlah informan yang dipilih secara purposive, berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam kegiatan gotong royong. Metode ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam sesuai konteks dan pengalaman masing-masing informan. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman mengenai motivasi, faktor pendorong dan penghambat, serta makna sosial di balik partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Dalam penelitian ini, rencana wawancara disusun sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

No	Nama Informan	Jabatan	Informasi yang Ingin Digali
1	Ibu Margareta	Ketua RT 002/RW 001, Lingkungan	Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan gotong royong, tingkat

		1, Bandar Jaya Barat	partisipasi warga, serta peran kepemimpinan lokal dalam mendorong keterlibatan masyarakat.
2	Bapak Abdul Khoirul Walid	Tokoh Masyarakat (Ketua Kerukunan Kematian Abadi)	Pandangan mengenai nilai sosial dan budaya yang melatarbelakangi partisipasi warga dalam gotong royong serta bentuk solidaritas antarwarga.
3	Bapak Hi. Maman Poniman	Warga Aktif	Motivasi dan faktor pendorong keikutsertaan warga dalam kegiatan gotong royong serta pengalaman pribadi selama berpartisipasi.
4	Bapak Dimas Santiaji	Warga Tidak Aktif	Alasan kurangnya keterlibatan dalam kegiatan gotong royong, kendala sosial atau ekonomi yang dihadapi, dan pandangan terhadap peran gotong royong di lingkungan.
5	Bapak Ust. Susilo	Tokoh Agama	Perspektif mengenai nilai-nilai moral, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik gotong royong serta relevansinya

			terhadap kehidupan bermasyarakat.
--	--	--	-----------------------------------

Melalui wawancara dengan informan tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor pendorong dan penghambat, serta makna sosial yang melekat pada kegiatan gotong royong sebagai praktik administrasi publik partisipatif di tingkat lokal.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang relevan dengan fokus penelitian, seperti foto kegiatan gotong royong, catatan kehadiran warga, serta data administrasi yang diperoleh dari Ketua RT setempat. Dokumentasi juga mencakup catatan hasil observasi dan wawancara yang dibuat secara langsung oleh peneliti. Meskipun bersifat sederhana, dokumentasi memiliki peran penting dalam memperkuat hasil penelitian karena berfungsi sebagai bukti empiris yang mendukung temuan lapangan serta meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menafsirkan makna di balik data empiris. Proses analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian secara interaktif dan berkesinambungan. Berdasarkan paradigma analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Qomaruddin & Sa'diyah, 2024), analisis data kualitatif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Begitu pula Adiwijaya et al. (2024) yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara simultan, yang memungkinkan peneliti menemukan pola makna di balik data empiris yang diperoleh dari lapangan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

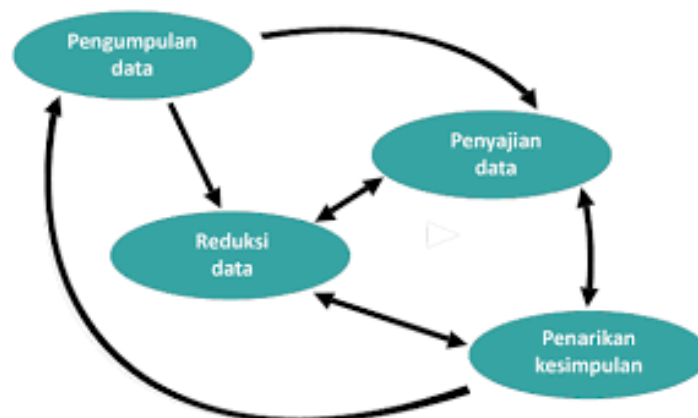
Tahap ini melibatkan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang tidak relevan atau bersifat berulang dihilangkan untuk memfokuskan analisis pada subjek utama seperti bentuk partisipasi masyarakat, faktor pendorong dan penghambat, serta makna sosial gotong royong.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi, data disusun ke dalam bentuk naratif yang sistematis untuk mempermudah pemahaman hubungan antar-temuan. Penyajian data dapat berupa deskripsi tekstual, tabel sederhana, maupun kutipan langsung dari informan yang menggambarkan pola dan dinamika sosial dalam kegiatan gotong royong.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah disajikan. Peneliti menilai konsistensi, validitas, serta relevansi temuan dengan tujuan penelitian melalui proses triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Gambar 1. Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman

Sumber: (Nursyafitri (2025))

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek fundamental dalam penelitian kualitatif untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya (*trustworthy*), akurat, dan sesuai dengan realitas lapangan. Penelitian ini mengacu pada empat kriteria validitas data yang dikemukakan oleh Lincoln & Guba dalam Mekarisce (2020), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

1. Kredibilitas (*Credibility*).

Kredibilitas bertujuan memastikan keakuratan dan kebenaran data yang diperoleh dari informan. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan realitas yang dimaksudkan.

2. Transferabilitas (*Transferability*).

Transferabilitas mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain dengan karakteristik serupa. Untuk itu, peneliti memberikan deskripsi yang jelas dan rinci mengenai latar sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat RT 002/RW 001, sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan terhadap situasi lain.

3. Dependabilitas (*Dependability*).

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian dari awal hingga akhir. Peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, agar langkah-langkah yang dilakukan dapat ditelusuri dan diuji ulang apabila penelitian serupa dilakukan di masa mendatang.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*).

Konfirmabilitas berfungsi memastikan bahwa hasil penelitian bersumber dari data empiris, bukan dari bias atau subjektivitas peneliti. Untuk menjamin hal ini, peneliti menyimpan bukti pendukung seperti catatan

lapangan, transkrip wawancara, dan dokumentasi kegiatan sebagai dasar verifikasi objektif terhadap hasil penelitian.

Dengan demikian, penerapan keempat kriteria keabsahan data tersebut diharapkan mampu menghasilkan temuan penelitian yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., ... & Muslim, F. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bailah, S. S. (2019). *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bobsuni, N., & Ma'ruf, M. F. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). *Publika*, 215-226. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p215-226>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Hidayati, R., & Suwanda, I. M. (2022). Upaya Pemerintah kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Media Center Surabaya sebagai Wujud Good Governance. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(4), 824-841 <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p824-841>
- Khairussalam, K., Zulaikha, S., Nur, R. I., & Maimunah, S. (2024). Analisis Modal Sosial dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 909-918. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5280>
- Kurnia, H., Khasanah, I. L., Kurniasih, A., Lamabawa, J., Darto, Y., Wawuan, F. Z., ... & Santoso, M. I. B. (2023). Gotong Royong Sebagai Sarana Dalam Mempererat Solidaritas Masyarakat Dusun Kalangan. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 277-282. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.754>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

- Lauria, M., & Slotterback, C. S. (Eds.). (2020). *Learning from Arnstein's ladder: From citizen participation to public engagement*. Routledge.
- Lestari, T. D., Susanti, T., Faishal, M. N. (2025). *Lampung Tengah dalam Angka 2025*. Lampung Tengah: BPS Kabupaten Lampung Tengah.
- Listyaningsih, L. (2022). Implementasi Karakter Gotong Royong Berbasis Online Collaborative Learning. *Proceeding Umsurabaya*, 1(1).
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Musri, M., & Mulia, R. A. (2022). *Etika Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Nursyafitri, G. D. (2025). *Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli*. DQLab. Diakses tanggal 7 Oktober 2025 dari <https://dqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>
- Pandiangan, B. C. B. (2024). *PENERAPAN KEGIATAN GOTONG ROYONG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA AFDELING II (Studi Kasus: Kebun Sei Meranti Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahman, M. S. A., Naumar, A., Mohammed, A. H., & Azis, S. S. A. (2021). Factors Affecting Participation In A Community-Based Program: Padang City- West

- Sumatra'S Experience. *Journal of Sustainable Technology and Applied Science (JSTAS)*, 2(1), 31-36. <https://doi.org/10.36040/jstas.v2i1.3575>
- Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55-67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Buku ajar pengantar ilmu administrasi publik*. Umsida Press, 1-92.
- Rohmah, I. Y., Judijanto, L., Ariesmansyah, A., Syarifuddin, S., Irawatie, A., Ikhwanudin, I., ... & Syahril, S. (2025). *Pengantar Administrasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rosyani, R., Muchlis, F., Napitupulu, D., & Faust, H. (2019). Gotong royong (cooperation) transformation of rural communities in Jambi Province, Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 103-110. <https://doi.org/10.22437/ppd.v7i1.7466>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694.
- Setiawan, I. W. A. (2017). *TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIS BALI DALAM KEGIATAN GOTONG ROYONG (STUDI KAMPUNG SAKTI BUANA SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH)*. Skripsi. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Subiyakto, B., Syaharuddin, S., & Rahman, G. (2017). Nilai-Nilai Gotong Royong Pada Tradisi Bahaul Dalam Masyarakat Banjar Di Desa Andhika Sebagai Sumber Pembelajaran IPS. *Vidya Karya*, 31(2).
- Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 14-24. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i1.1408>
- Widayati, S. (2020). *Gotong royong*. Alprin.
- Yusuf, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1849-1860.
- Zuraidah, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 3(1), 131-148.